

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

Jawa Tengah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan Semarang sebagai ibu kotanya. Wilayah Jawa Tengah terletak di antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km. Luas wilayahnya 32.548 km² atau sekitar 28,94% dari luas total Pulau Jawa. Berikut batas-batas wilayah Provinsi Jawa Tengah:¹

- a) Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat.
- b) Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan DIY.
- c) Timur berbatasan langsung dengan Jawa Timur.
- d) Utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/Kota yang terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, yang mengawasi 573 kecamatan. Di tingkat yang lebih lokal, terdapat 7.809 desa dan 750 kelurahan. Keanekaragaman jumlah kelurahan/desa ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbesar di Indonesia.²

Tabel 4.1. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Luas (KM ²)	No.	Kabupaten/Kota	Luas (KM ²)
1.	Cilacap	2.124.47	19.	Kudus	425.15
2.	Banyumas	1.335.30	20.	Jepara	1.059.25
3.	Purbalingga	677.55	21.	Demak	900.12
4.	Banjarnegara	1.023.73	22.	Semarang	950.21
5.	Kebumen	1.211.74	23.	Temanggung	837.71
6.	Purworejo	1.091.49	24.	Kendal	1.118.13
7.	Wonosobo	981.41	25.	Batang	788.65

¹ Diskominfo Jawa Tengah, "Geografi Dan Demografi," 2020, <http://www.limapuluhkotakab.go.id/hal-geografi-dan-demografi.html>.

² Badan Pusat Statistik, "Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah," 2017.

8.	Magelang	1.102.93	26.	Pekalongan	837.00
9.	Boyolali	1.008.45	27.	Pemalang	1.118.03
10.	Klaten	658.22	28.	Tegal	876.10
11.	Sukoharjo	489.12	29.	Brebes	1.902.37
12.	Wonogiri	1.793.67	30.	Magelang	16.06
13.	Karanganyar	775.44	31.	Surakarta	46.01
14.	Sragen	941.54	32.	Salatiga	57.36
15.	Grobogan	2.013.86	33.	Semarang	373.78
16.	Blora	1.804.59	34.	Pekalongan	45.25
17.	Rembang	887.13	35.	Tegal	39.68
18.	Pati	1.489.19			

Sumber : BPS Jawa Tengah 2023

Penduduk memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi suatu daerah. Kehadiran penduduk dalam suatu wilayah akan memengaruhi kemajuan ekonomi di wilayah tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jawa Tengah, sebagai provinsi yang beragam memiliki masyarakat multikultural dengan beragam latar belakang etnis, agama, dan tingkat perkembangan ekonomi yang bervariasi.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2017	34.257.865
2.	2018	34.490.835
3.	2019	34.718.204
4.	2020	36.516.035
5.	2021	36.742.501
6.	2022	37.032.410

Sumber : BPS Jawa Tengah 2023

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk selama kurun waktu 6 tahun yaitu tahun 2017 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk semakin meningkat, terlihat pada tahun 2017 terdapat 34.257.865 jiwa dan pada tahun 2022 terdapat 37.032.410 jiwa. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan kesempatan kerja agar penduduk di Jawa Tengah dapat lebih produktif.

Jumlah penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah 37.032.410 jiwa yang terdiri dari 18.614.868 laki-laki dan 18.417.542 perempuan. Tiga Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar seprovinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 yaitu Kabupaten Brebes (2.010.617 jiwa), Kabupaten Cilacap (1.988.622 jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1.806.013 jiwa). Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah periode 2020-2022 rata-rata pertahun sebesar 1,02 persen.³

Berikut ini merupakan kondisi Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

a. Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan sebuah indeks komposit yang digunakan untuk menilai prestasi rata-rata suatu negara dalam tiga hal aspek pembangunan manusia.⁴ IPM merupakan parameter yang sangat penting dalam mengevaluasi suksesnya upaya meningkatkan kualitas manusia. IPM berguna untuk menilai dampak kebijakan ekonomi suatu negara terhadap tingkat kesejahteraan penduduknya.⁵

Tabel 4.3. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

No	Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Kabupaten Cilacap	68,90	69,56	69,98	69,95	70,42	70,99	69,97
2	Kabupaten Banyumas	70,75	71,30	71,96	71,98	72,44	73,17	71,93
3	Kabupaten Purbalingga	67,72	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54	68,80
4	Kabupaten Banjarnegara	65,86	66,54	67,34	67,45	67,86	68,61	67,28
5	Kabupaten Kebumen	68,29	68,80	69,60	69,81	70,05	70,79	69,56
6	Kabupaten Purworejo	71,31	71,87	72,50	72,68	72,98	73,60	72,49

³ Badan Pusat Statistik, ‘Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah’, 2017: 1–23.

⁴ Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah 2022.”

⁵ Prasetyoningrum, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.”

7	Kabupaten Wonosobo	66,89	67,81	68,27	68,22	68,43	68,89	68,09
8	Kabupaten Magelang	68,39	69,11	69,87	69,87	70,12	70,85	69,70
9	Kabupaten Boyolali	72,64	73,22	73,80	74,25	74,40	74,97	73,88
10	Kabupaten Klaten	74,25	74,79	75,29	75,56	76,12	76,95	75,49
11	Kabupaten Sukoharjo	75,56	76,07	76,84	76,98	77,13	77,94	76,75
12	Kabupaten Wonogiri	68,66	69,37	69,98	70,25	70,49	71,04	69,97
13	Kabupaten Karanganyar	75,22	75,54	75,89	75,86	75,99	76,58	75,85
14	Kabupaten Sragen	72,40	72,96	73,43	73,95	74,08	74,65	73,58
15	Kabupaten Grobogan	68,87	69,32	69,86	69,87	70,41	70,97	69,88
16	Kabupaten Bora	67,52	67,95	68,65	68,84	69,37	69,95	68,71
17	Kabupaten Rembang	68,95	69,46	70,15	70,02	70,43	71,00	70,00
18	Kabupaten Pati	70,12	70,71	71,35	71,77	72,28	73,14	71,56
19	Kabupaten Kudus	73,84	74,58	74,94	75,00	75,16	75,89	74,90
20	Kabupaten Jepara	70,79	71,38	71,88	71,99	72,36	73,15	71,93
21	Kabupaten Demak	70,41	71,26	71,87	72,22	72,57	73,36	71,95
22	Kabupaten Semarang	73,20	73,61	74,14	74,10	74,24	74,67	73,99
23	Kabupaten Temanggung	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77	69,49
24	Kabupaten Kendal	70,62	71,28	71,97	72,29	72,50	73,19	71,98
25	Kabupaten Batang	67,35	67,86	68,42	68,65	68,92	69,45	68,44
26	Kabupaten Pekalongan	68,40	68,97	69,71	69,63	70,11	70,81	69,61
27	Kabupaten Pemaslang	65,04	65,67	66,32	66,32	66,56	67,19	66,18
28	Kabupaten Tegal	65,05	67,33	68,24	68,39	68,79	69,53	67,89
29	Kabupaten Brebes	65,06	65,68	66,12	66,11	66,32	67,03	66,05
30	Kota Magelang	65,07	78,31	78,80	78,99	79,43	80,39	76,83
31	Kota Surakarta	65,08	81,46	81,86	82,21	82,62	83,08	79,39

32	Kota Salatiga	65,09	82,41	83,12	83,14	83,60	84,35	80,29
33	Kota Semarang	65,10	82,72	83,19	83,05	83,55	84,08	80,28
34	Kota Pekalongan	65,11	74,24	74,77	74,98	75,40	75,90	73,40
35	Kota Tegal	65,12	74,44	74,93	75,07	75,52	76,15	73,54

Sumber : BPS, 2024 yang diolah

Tabel 4.3 menunjukkan masing-masing kabupaten/kota, IPM menunjukkan perkembangan yang positif. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Salatiga yakni sebesar 80,29. Sedangkan rata-rata IPM terendah berada di Kabupaten Brebes yakni sebesar 66,05. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh perbedaan variasi yang ada di setiap daerah, mulai dari infrastruktur, SDM, ekonomi, hingga kebijakan pembangunan. Inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam nilai IPM antara satu wilayah dengan wilayah lainnya⁶ IPM Provinsi Jawa Tengah sendiri, berdasarkan klasifikasi IPM yang telah ditetapkan BPS, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kategori tinggi atas yakni kisaran 66-80.

b. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi yang penting atau bahkan diperlukan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang penting untuk menilai baik buruknya kondisi perekonomian suatu negara serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menjelaskan performa perekonomian, namun indikator ini memberikan gambaran tentang aktivitas ekonomi suatu negara. Berikut Tabel 4.4 Perkembangan Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022.

⁶ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah 2022* (Jakarta: Bank Indonesia, 2022).

Tabel 4.4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2022

No	Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Kabupaten Cilacap	2,58	2,99	2,27	-10,28	2,15	5,13	0,81
2	Kabupaten Banyumas	6,34	6,45	6,32	-1,65	4,00	5,86	4,55
3	Kabupaten Purbalingga	5,37	5,42	5,64	-1,18	3,19	5,41	3,98
4	Kabupaten Banjarnegara	5,65	5,67	5,60	-1,32	3,26	5,29	4,03
5	Kabupaten Kebumen	5,15	5,53	5,52	-1,45	3,71	5,79	4,04
6	Kabupaten Purworejo	5,27	5,33	5,44	-1,61	3,31	5,36	3,85
7	Kabupaten Wonosobo	4,14	5,06	5,57	-1,64	3,68	5,02	3,64
8	Kabupaten Magelang	5,50	5,28	5,30	-1,67	3,48	5,46	3,89
9	Kabupaten Boyolali	5,80	5,72	5,96	-1,20	4,63	6,33	4,54
10	Kabupaten Klaten	5,34	5,47	5,48	-1,17	3,82	5,90	4,14
11	Kabupaten Sukoharjo	5,76	5,79	5,92	-1,70	3,82	5,61	4,20
12	Kabupaten Wonogiri	5,32	5,41	5,14	-1,41	3,35	5,63	3,91
13	Kabupaten Karanganyar	5,77	5,98	5,76	-1,87	3,57	5,87	4,18
14	Kabupaten Sragen	5,97	5,75	5,90	-1,81	3,75	5,76	4,22
15	Kabupaten Grobogan	5,85	5,83	5,37	-1,57	3,78	5,98	4,21
16	Kabupaten Blora	5,98	4,38	4,05	-4,56	3,68	2,68	2,70
17	Kabupaten Rembang	6,98	5,89	5,20	-1,49	3,85	5,55	4,33
18	Kabupaten Pati	5,67	5,71	5,81	-1,16	3,38	5,56	4,16
19	Kabupaten Kudus	3,21	3,24	3,09	-3,11	-1,54	2,23	1,19
20	Kabupaten Jepara	5,39	5,85	6,02	-1,92	4,63	5,95	4,32
21	Kabupaten Demak	5,82	5,40	5,36	-0,23	2,62	5,25	4,04
22	Kabupaten Semarang	5,65	5,67	5,39	-2,67	3,63	5,31	3,83
23	Kabupaten Temanggung	5,03	5,13	5,05	-2,13	3,34	5,20	3,60
24	Kabupaten	5,78	5,77	5,71	-1,51	3,89	5,69	4,22

	Kendal							
25	Kabupaten Batang	5,55	5,72	5,39	-1,29	4,88	5,97	4,37
26	Kabupaten Pekalongan	5,44	5,76	5,35	-1,89	3,54	5,11	3,89
27	Kabupaten Pemalang	5,61	5,69	5,80	-0,61	4,28	5,08	4,31
28	Kabupaten Tegal	5,38	5,51	5,56	-1,48	3,71	5,14	3,97
29	Kabupaten Brebes	5,65	5,26	5,76	-0,47	2,57	5,61	4,06
30	Kota Magelang	5,42	5,46	5,41	-2,45	3,20	5,77	3,80
31	Kota Surakarta	5,70	5,75	5,78	-1,76	4,01	6,25	4,29
32	Kota Salatiga	5,58	5,84	5,90	-1,68	3,35	5,53	4,09
33	Kota Semarang	6,70	6,48	6,81	-1,85	5,16	5,73	4,84
34	Kota Pekalongan	5,32	5,69	5,50	-1,87	3,59	5,76	4,00
35	Kota Tegal	5,95	5,87	5,77	-2,29	3,12	5,16	3,93

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Tabel 4.4 menunjukkan pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing kabupaten/kota dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dan lamban. Di tahun 2020 semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, akibat adanya pandemi Covid-19. Selain itu, dapat diketahui kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata tertinggi dicapai oleh Kota Semarang yakni 4,84%. Sedangkan kabupaten/kota dengan rata-rata terendah ditempati Kabupaten Cilacap yakni 0,81%. Perbedaan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh kelebihan dan kelemahan yang menjadi karakteristik masing-masing daerah. Faktor lain yang berperan adalah cara pengelolaan dan pengolahan sumber daya yang berbeda, sehingga menghasilkan *output* yang bervariasi di tiap wilayah⁷

c. Deskripsi Pengangguran

Tingkat pengangguran menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok

⁷ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2022), 40.

pengangguran.⁸ Berikut Tabel 4.5 tingkat pengangguran dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif.

Tabel 4.5. Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

No	Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Kabupaten Cilacap	6,30	7,49	7,24	9,10	9,97	9,62	8,29
2	Kabupaten Banyumas	4,62	4,15	4,17	6,00	6,05	6,05	5,17
3	Kabupaten Purbalingga	5,33	6,02	4,73	6,10	6,05	5,23	5,58
4	Kabupaten Banjarnegara	4,72	3,99	4,44	5,86	5,86	6,38	5,21
5	Kabupaten Kebumen	5,58	5,48	4,69	6,07	6,03	5,92	5,63
6	Kabupaten Purworejo	3,64	4,43	2,91	4,04	3,59	4,45	3,84
7	Kabupaten Wonosobo	4,18	3,50	3,43	5,37	5,26	5,01	4,46
8	Kabupaten Magelang	2,44	2,89	3,07	4,27	5,03	4,97	3,78
9	Kabupaten Boyolali	3,67	2,18	3,09	5,28	5,09	4,92	4,04
10	Kabupaten Klaten	4,35	3,14	3,54	5,46	5,48	4,31	4,38
11	Kabupaten Sukoharjo	2,27	2,72	3,39	6,93	3,32	2,47	3,52
12	Kabupaten Wonogiri	2,38	2,28	2,55	4,27	2,43	1,95	2,64
13	Kabupaten Karanganyar	3,17	2,28	3,12	5,96	5,89	5,70	4,35
14	Kabupaten Sragen	4,55	4,83	3,32	4,75	4,76	4,69	4,48
15	Kabupaten Grobogan	3,02	2,22	3,54	4,50	4,38	4,40	3,68
16	Kabupaten Blora	2,85	3,30	3,82	4,89	3,81	3,70	3,73
17	Kabupaten Rembang	3,19	2,83	3,60	4,83	3,67	1,76	3,31
18	Kabupaten Pati	3,83	3,57	3,64	4,74	4,60	4,45	4,14
19	Kabupaten Kudus	3,56	3,28	3,80	5,53	3,77	3,21	3,86
20	Kabupaten Jepara	4,84	3,75	2,92	6,70	4,23	4,10	4,42
21	Kabupaten Demak	4,47	7,03	5,42	7,31	5,28	6,11	5,94
22	Kabupaten Semarang	1,78	2,25	2,54	4,57	5,02	4,81	3,50
23	Kabupaten Temanggung	2,97	3,23	2,98	3,85	2,62	2,54	3,03

⁸ Diah Retniwati, "Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi* 4, no. 1 (2017): 56.

24	Kabupaten Kendal	4,93	6,02	6,26	7,56	7,55	7,34	6,61
25	Kabupaten Batang	5,82	4,20	4,11	6,92	6,59	6,64	5,71
26	Kabupaten Pekalongan	4,39	4,36	4,35	6,97	4,28	3,23	4,60
27	Kabupaten Pemasang	5,59	6,17	6,45	7,64	6,71	6,63	6,53
28	Kabupaten Tegal	7,33	8,24	8,12	9,82	9,97	9,64	8,85
29	Kabupaten Brebes	8,04	7,20	7,39	9,83	9,78	9,48	8,62
30	Kota Magelang	6,68	4,78	4,37	8,59	8,73	6,71	6,64
31	Kota Surakarta	4,47	4,35	4,16	7,92	7,85	5,83	5,76
32	Kota Salatiga	3,96	4,23	4,33	7,44	7,26	5,58	5,47
33	Kota Semarang	6,61	5,21	4,50	9,57	9,54	7,60	7,17
34	Kota Pekalongan	5,05	6,08	5,80	7,02	6,89	4,98	5,97
35	Kota Tegal	8,19	7,81	8,08	8,40	8,25	6,68	7,90

Sumber : BPS, 2024 (data diolah)

Tabel 4.5 menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2022, bahwa tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Rata-rata tingkat pengangguran tertinggi dicapai oleh Kabupaten Tegal yakni sebesar 8,85 persen. Sedangkan rata-rata tingkat pengangguran terendah dicapai oleh Kabupaten Wonogiri yakni sebesar 2,64 persen. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam tingkat pengangguran antara kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dalam struktur ekonomi, tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, dan kebijakan pemerintah di masing-masing wilayah.⁹

d. Deskripsi Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Hal ini sangat sulit dihindari, terutama di negara-negara berkembang.

⁹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2022), 56.

Kemiskinan tidak hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang perlakuan tidak adil dari masyarakat yang lebih makmur secara ekonomi, yang menciptakan kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Situasi ini sangat mengkhawatirkan, dan pemerintah dianjurkan untuk mengurangi kemiskinan. Namun, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan seringkali sulit dilaksanakan sepenuhnya.

Tabel 4.6. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

No	Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Kabupaten Cilacap	13,94	11,25	10,73	11,46	11,67	11,02	11,68
2	Kabupaten Banyumas	17,05	13,50	12,53	13,26	13,66	12,84	13,81
3	Kabupaten Purbalingga	18,80	15,62	15,03	15,90	16,24	15,30	16,15
4	Kabupaten Banjarnegara	17,21	15,46	14,76	15,64	16,23	15,20	15,75
5	Kabupaten Kebumen	19,60	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41	17,62
6	Kabupaten Purworejo	13,81	11,67	11,45	11,78	12,40	11,53	12,11
7	Kabupaten Wonosobo	20,32	17,58	16,63	17,36	17,67	16,17	17,62
8	Kabupaten Magelang	12,42	11,23	10,67	11,27	11,91	11,09	11,43
9	Kabupaten Boyolali	11,96	10,04	9,53	10,18	10,62	9,82	10,36
10	Kabupaten Klaten	14,15	12,96	12,28	12,89	13,49	12,33	13,02
11	Kabupaten Sukoharjo	8,75	7,41	7,14	7,68	8,23	7,61	7,80
12	Kabupaten Wonogiri	12,90	10,75	10,25	10,86	11,55	10,99	11,22
13	Kabupaten Karanganyar	12,28	10,01	9,55	10,28	10,68	9,85	10,44
14	Kabupaten Sragen	14,02	13,12	12,79	13,38	13,83	12,94	13,35
15	Kabupaten Grobogan	13,27	12,31	11,77	12,46	12,74	11,80	12,39
16	Kabupaten Blora	13,04	11,90	11,32	11,96	12,39	11,53	12,02
17	Kabupaten Rembang	18,35	15,41	14,95	15,60	15,80	14,65	15,79
18	Kabupaten Pati	11,38	9,90	9,46	10,08	10,21	9,33	10,06
19	Kabupaten Kudus	7,59	6,98	6,68	7,31	7,60	7,41	7,26
20	Kabupaten Jepara	8,12	7,00	6,66	7,17	7,44	6,88	7,21
21	Kabupaten Demak	13,41	12,54	11,86	12,54	12,92	12,09	12,56
22	Kabupaten Semarang	7,78	7,29	7,04	7,51	7,82	7,27	7,45

23	Kabupaten Temanggung	11,46	9,87	9,42	9,96	10,17	9,33	10,04
24	Kabupaten Kendal	11,10	9,84	9,41	9,99	10,24	9,48	10,01
25	Kabupaten Batang	10,80	8,69	8,35	9,13	9,68	8,98	9,27
26	Kabupaten Pekalongan	12,61	10,06	9,71	10,19	10,57	9,67	10,47
27	Kabupaten Pemalang	17,37	16,04	15,41	16,02	16,56	15,06	16,08
28	Kabupaten Tegal	9,90	7,94	7,64	8,14	8,60	7,90	8,35
29	Kabupaten Brebes	19,14	17,17	16,22	17,03	17,43	16,05	17,17
30	Kota Magelang	8,75	7,87	7,46	7,58	7,75	7,10	7,75
31	Kota Surakarta	10,65	9,08	8,70	9,03	9,40	8,84	9,28
32	Kota Salatiga	5,07	4,84	4,76	4,94	5,14	4,73	4,91
33	Kota Semarang	4,62	4,14	3,98	4,34	4,56	4,25	4,32
34	Kota Pekalongan	7,47	6,75	6,60	7,17	7,59	7,00	7,10
35	Kota Tegal	8,11	7,81	7,47	7,80	8,12	7,91	7,87

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Tabel 4.6 menunjukkan hasil dari masing-masing kabupaten/kota, secara umum perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami tren fluktuatif pada periode tahun 2017-2022. Kemiskinan tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan karena adanya pandemi Covid-19. Selain itu, berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kabupaten/kota dengan rata-rata presentase penduduk miskin tertinggi dari tahun 2017-2022 ditempati oleh Kabupaten Wonosobo dan Kebumen sebesar 17,62 persen, yang disusul 33 Kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Diketahui bahwa terdapat kesenjangan dalam tingkat kemiskinan di wilayah administratif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, terdapat perbedaan angka kemiskinan antara kabupaten/kota tersebut, terutama antara Kota Semarang dan Kabupaten Kebumen yang memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dalam struktur ekonomi lokal, infrastruktur, aksesibilitas, kebijakan pemerintah, demografi, geografi, dan lingkungan.¹⁰

¹⁰ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2022), 62.

2. Analisis Data

Hasil analisis data merupakan hasil dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan. Berguna untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan penelitian telah ditentukan sebelumnya, yaitu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2017-2022.

a) **Estimasi Model Regresi Data Panel**

1. *Common Effect Model*

Tabel 4. 7. Hasil Common Effect Model

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai Sig.
Konstanta	81,50100	0,0000
Pertumbuhan Ekonomi	0,023086	0,7830
Pengangguran	0,086224	0,4925
Kemiskinan	-0,863494	0,0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9, 2024

Tabel 4.7 memperlihatkan hasil bahwa secara parsial variabel kemiskinan memiliki nilai signifikansi < 0,05 yang menandakan bahwa kemiskinan mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan hasil yang simultan pada model regresi ini.

2. *Fixed Effect Model*

Tabel 4. 8. Hasil Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai Sig.
Konstanta	76.95151	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi	-0.014121	0.6194
Pengangguran	0.275275	0.0003
Kemiskinan	-0.529693	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9, 2024

Tabel 4.8 memperlihatkan hasil model regresi ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara parsial pada variabel pengangguran dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia dengan signifikansi < 0,05 dan hasil yang simultan pada model regresi ini.

3. *Random Effect Model*

Tabel 4.9. Hasil Random Effcet Model

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai Sig.
Konstanta	77.85769	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi	-0.015169	0.5904
Pengangguran	0.262964	0.0004
Kemiskinan	-0.604999	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9, 2024

Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa pengangguran dan kemiskinan memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yang menandakan pengangguran dan kemiskinan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

b) **Pemilihan Model Regresi Data Panel**

1. Uji *Chow*

Tabel 4.10. Hasil Uji *Chow*

<i>Effects Test</i> (Hasil Tes)	Probabilitas
<i>Cross-section F</i>	0,0000
<i>Cross-section Chi-Square</i>	0,0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9, 2024

Tabel 4.10 Uji *Chow* yang dilakukan diperoleh nilai *Prob. Cross-section Chi-square* $< \alpha$ 5% ($\alpha = 0.05$) yaitu sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih yakni *fixed effect model*.

2. Uji *Hausman*

Tabel 4.11. Hasil Uji *Hausman*

<i>Test Sumary</i>	Probabilitas
<i>Cross-section Random</i>	0,0898

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9, 2024

Tabel 4.11 Hasil Uji *Hausman* yang telah dilakukan diperoleh nilai *Prob. Cross-section random* $> \alpha$ 5% ($\alpha = 0.05$) yaitu sebesar 0,0898. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* yang tepat untuk digunakan dari pada *Fixed Effect Model*.

3. Uji Lagrange Multipler (LM)

Tabel 4.12. Hasil Uji Lagrange Multipler

	<i>Scross-section</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	0,0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9, 2024

Hasil Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 atau < 0.05 . Hasil ini menunjukkan bahwa *Random Effect Model* lebih tepat digunakan daripada *Common Effect Model*. Dari hasil uji LM ini sekaligus dapat ditarik kesimpulan akhir untuk pemilihan model regresi data panel yang terbaik guna penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Tabel 4.13. Random Effect Model

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai Sig.
Konstanta	77.85769	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi	-0.015169	0.5904
Pengangguran	0.262964	0.0004
Kemiskinan	-0.604999	0.0000

Sumber : Data olahan menggunakan Eviews 9, 2024

Hasil pemilihan model regresi yang telah dilakukan maka, diperoleh model regresi yang tepat digunakan yaitu *random effect model*. Berikut persamaan model analisis regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon$$

$$IPM = 81,5010 + 0,0230 PE + 0,0862 TPT - 0,8634 KMK + \epsilon$$

Berikut ini adalah penjelasan dari persamaan regresi data panel diatas:

1. Pada persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 81.5010. Apabila variabel PE, TPT, dan KMK atau semua variabel bebas dianggap konstan atau tetap, maka nilai IPM yaitu sebesar 81.5010.
2. Pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), diketahui koefisien variabel ini sebesar 0.0230. Tanda positif pada koefisien memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dengan variabel dependen yaitu

IPM. Sehingga apabila nilai pertumbuhan ekonomi naik 1 maka nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.0230.

3. Pada variabel pengangguran, diperoleh koefisien sebesar 0.0862. Seperti variabel pertumbuhan ekonomi, tanda positif menunjukkan bahwa setiap nilai pengangguran naik 1, maka nilai IPM akan naik sebesar 0.0862. begitu pula sebaliknya, apabila nilai pengangguran turun 1 maka nilai IPM akan turun sebesar 0.0862.
4. Koefisien pada variabel kemiskinan diketahui sebesar - 0.8634. Nilai negatif menunjukkan bahwa pengaruh kemiskinan terhadap IPM adalah berlawanan arah. Dimana, apabila nilai kemiskinan naik 1, maka IPM mengalami penurunan sebesar 0.8634. sebaliknya, apabila nilai kemiskinan turun 1 maka nilai IPM akan naik sebesar 0.8634.

c) **Uji Signifikansi**

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-Squared</i>	<i>Adjusted R-Squared</i>
0.475547	0.467909

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9, 2024

Tabel 4.10 menunjukkan nilai *R-square* (R^2) atau koefisien determinasi dengan nilai sebesar 0.467909. besaran nilai *R-squared* tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan mampu menjelaskan varian dari variabel terikat yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah sebesar 46,79%. Sisanya 53,21% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

2. Uji F

Tabel 4.15. Hasil Uji F

Variabel Y	Variabel X	Nilai Sig.	Kesimpulan
Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan Ekonomi	0,0000	Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan berpengaruh secara simultan terhadap
	Pengangguran		

	Kemiskinan	indeks pembangunan manusia
--	------------	----------------------------

Sumber : data olahan Eviews 9, 2024

Uji F atau simultan, diketahui nilai *Prob. F statistic* sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil atau kurang dari alpha 5% ($\alpha = 0,05$), bahwa variabel bebas yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yakni Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah.

3. Uji t

Tabel 4.16. Hasil Uji t

Variabel Y	Variabel X	Nilai Sig.	Kesimpulan
Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan Ekonomi	0,7830	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
	Pengangguran	0,4925	Pengangguran tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
	Kemiskinan	0,0000	Kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

Sumber : Data Olahan Menggunakan Eviews 9, 2024

Hasil uji t atau parsial dengan alpha 5% ($\alpha = 0,05$), menunjukkan terdapat satu variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia yakni Kemiskinan. Secara berurutan nilai $Prob < \alpha 5\%$ ($\alpha = 0,05$), dari satu variabel tersebut sebesar 0,0000. Kemudian dua variabel tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran, dengan nilai $Prob. > \alpha 5\%$ ($\alpha = 0,05$) yakni sebesar 0,7830 dan 0,4925.

B. Pembahasan

Pada sub-bagian ini, akan dijelaskan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan teori serta analisis hasil regresi, dengan mempertimbangkan situasi yang sesungguhnya terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi fokus penelitian.

1. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari persamaan diketahui variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan koefisien sebesar 0.0230 artinya jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 2,30% artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan IPM di Jawa Tengah. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh t hitung lebih besar daripada t tabel sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka hasil uji disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM di Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hasil regresi tersebut sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM di Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lora, dkk yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.¹¹ Begitu juga pada penelitian Abie dan Dewi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia.¹² Hal tersebut terjadi akibat dari sektor ekonomi yang belum maksimal dikelola oleh pemerintah seperti sektor pertanian, industri, perdagangan dan sektor lainnya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori klasik Adam Smith yang menganggap bahwa manusia sebagai faktor penduduk yang menentukan kemakmuran suatu negara. Berarti pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata mendorong kemakmuran suatu wilayah. Hal tersebut disebabkan

¹¹ Nainggolan, Sembiring, and Nainggolan, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Berdampak Pada Kemiskinan Di Porvinsi Sumatera Utara."

¹² Muhamad and Rahmi, "Pengaruh Teknologi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintha, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jabar."

pertumbuhan ekonomi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan individu akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan.

Indonesia pada tahun 2020 dilanda pandemi Covid-19 terkhusus di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi pada tahun tersebut perekonomian Jawa Tengah menurun hingga 1,99%. Selain adanya pandemi Covid-19 juga diiringi dengan faktor lain seperti kelahiran bayi, migrasi, dan lain sebagainya. Meskipun perekonomian tahun 2020 sempat menurun, IPM di Provinsi Jawa Tengah tetap meningkat. Hal tersebut terjadi karena kegiatan sekolah masih tetap berlanjut dengan cara diganti dengan *daring* atau belajar di rumah menggunakan *android*, banyak pekerja yang terkena pemecatan secara masal akhirnya banting stir menjadi penjual *online*, banyaknya rumah sakit yang bisa menangani pasien Covid-19, serta banyaknya bantuan yang digelontorkan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Sehingga banyak harapan untuk hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah itu tinggi. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi akibat dari pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara langsung mencerminkan peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dikarenakan distribusi pendapatan yang tidak merata kepada masyarakat. IPM hanya terfokus pada pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup. Selain itu, melihat dari data statistik pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi, sehingga memberikan pengaruh kecil terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa variabel Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Dari persamaan diketahui variabel pengangguran menunjukkan koefisien 0.0862. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengangguran mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 1% maka akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0.0862. Untuk variabel pengangguran diperoleh t hitung lebih besar daripada t tabel sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka hasil uji disimpulkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM di Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hasil regresi tersebut sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga tidak terdapat pengaruh antara pengangguran dengan IPM di Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Sari Dewi, dkk bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro.¹³ Sejalan juga dengan penelitiannya Indrasuara, dkk yang menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat.¹⁴ Hal tersebut terjadi karena wilayah tersebut masih didominasi sama penduduk yang bekerja pada sektor pertanian.

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan teori klasik Adam Smith yang menganggap bahwa manusia sebagai faktor penduduk yang menentukan kemakmuran suatu negara. Kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara akan menurun jika pengangguran meningkat, sehingga IPM juga akan menurun. Hal tersebut terjadi selama masyarakatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akibat tidak memiliki penghasilan.

Tingginya angka pengangguran yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah disebabkan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, namun terbatasnya lowongan pekerjaan yang tersedia. Keterampilan angkatan kerja yang belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan pekerjaan. Terlebih pada tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang membuat banyak pekerja yang dikeluarkan dari perusahaan akibat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan perusahaan.

Pengangguran Jawa Tengah sendiri tidak memengaruhi IPM Jawa Tengah karena IPM lebih fokus pada indikatornya. Pengangguran dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, namun IPM tergantung pada bagaimana pemerintah Jawa Tengah mampu menanggapi masalah tersebut, seperti menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. IPM Jawa Tengah tetap naik meskipun pengangguran Jawa Tengah sempat meningkat juga, selama aspek-aspek lain dari kesejahteraan manusia terjamin.

¹³ Kurnia Sari Dewi, Wiwin Priana Primandhana, and Mohammad Wahed, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengngguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bojonegoro," *Syntax Idea* 3, no. 4 (2021): 834-47.

¹⁴ Indrasuara Luther Sirangi Si'lang, Zamruddin Hasid, and Priyagus, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *Jurnal Manajemen* 11, no. 2 (2019): 159-69.

3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Dari persamaan diketahui variabel kemiskinan menunjukkan koefisien -0.863493 artinya jika terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 86,3% artinya setiap peningkatan Kemiskinan menurunkan persentase IPM di Jawa Tengah. Untuk variabel kemiskinan diperoleh *p-value* kurang dari 0.05. Maka hasil uji disimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hasil regresi tersebut tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemiskinan dengan IPM di Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggi Ayunara yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.¹⁵ Begitu juga pada penelitiannya Tahan Upoyo Trisno, dkk yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020.¹⁶ Hal tersebut demikian karena pada umumnya penduduk miskin menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil tersebut memperjelas bahwa semakin tinggi populasi penduduk miskin maka akan menekan tingkat pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Klasik Adam Smith yang menganggap bahwa kemiskinan menjadi salah satu parameter kritis dalam menilai kesejahteraan manusia. Kondisi kehidupan tersebut sulit dalam mengakses pendidikan, kesehatan, bahkan standar kehidupan yang masuk dalam kategori IPM. Kemiskinan nantinya akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan

¹⁵ Ayunara, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2018-2022."

¹⁶ Trisno, Munajat, and Oktarina, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020."

pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,09% dan 11,40%. Peningkatan tersebut akibat terjadinya pandemi Covid-19. Meski sempat mengalami kenaikan, di tahun 2022 kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 10,38. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Berpengaruh negatifnya kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Ketika orang hidup dalam kemiskinan, mereka cenderung memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang berkualitas sehingga memengaruhi dimensi kesehatan dan pendidikan dari IPM. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi juga dapat merugikan aspek kehidupan lain yang diukur dalam IPM, seperti harapan hidup dan standar hidup yang layak.

